

# PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PERHITUNGAN PERJALANAN DINAS PADA BALAI WILAYAH SUNGAI KALIMANTAN III BERBASIS WEB

Marshelina Putri Permata Sari<sup>1</sup>, Phaureula Artha Wulandari<sup>2</sup>, Muhammad Bahit<sup>3</sup> Politeknik Negeri Banjarmasin,

<u>D020318012@akuntansipoliban.ac.id</u><sup>1</sup>, <u>ayu.phaureula@akuntansipoliban.ac.id</u><sup>2</sup>· <u>bahit@poliban.ac.id</u><sup>3</sup>

#### **Abstract**

Computers are an alternative in this day and age to perform data processing systems. There are so many benefits of computers in agencies and companies, especially for the administrative and financial fields within agencies or companies in order to make office work more efficient and effective, such as making an Official Travel Order (SPPD) using a computer system. So far, the Office of the Kalimantan River Basin III in making the SPPD has not fully used the system, so that it has an impact on the service and reporting of the annual SPPD. This study aims to create a web-based SPPD to speed up the process of making SPPD and annual reports. The research method used is research and development/R&D with a case study at the Kalimantan River Basin III. The results of this study indicate that using a web-based SPPD can speed up the process of making SPPD and make it easier to make annual reports.

**Keywords:** Business Travel Calculation

#### Abstrak

Komputer menjadi alternatif pada zaman sekarang ini untuk melakukan sistem pengolahan data. Banyak sekali manfaat komputer dalam instansi maupun perushaan terutama bagi bidang administrasi dan keuangan di dalam instansi atau perusahaan guna mengefisiensikan dan efektifitas pekerjaan kantor seperti pembuatan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) menggunakan sistem komputer. Selama ini, kantor Balai Wilayah Sungai Kalimantan III dalam pembuatan SPPD belum sepenuhnya menggunakan sistem, sehingga berdampak pada pelayanan dan pelaporan SPPD tahunan. Penelitian ini bertujuan untuk membuat SPPD berbasis web untuk mempercepat proses pembuatan SPPD dan laporan tahunan. Metode penelitian yang digunakan adalah research and development/ R&D dengan studi kasus pada Balai Wilayah Sungai Kalimantan III. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunakan SPPD berbasis web dapat mempercepata proses pembuatan SPPD serta mempermudah dalam pembuatan laporan tahunan.

Keywords: Perhitungan Perjalanan Dinas

#### **PENDAHULUAN**

Penggunaan sistem informasi sudah memasuki seluruh sektor bisnis, hal ini ditandai dengan penggunaan sistem informasi pada dunia korporasi kecil, menengah hingga besar. Sistem informasi sudah menjadi kebutuhan korporasi yang memiliki visi dalam peningkatan kinerja [1].

Dalam kehidupan sehari-hari pun semua sudah menggunakan sistem komputerisasi seperti di sekolah, kantor, pusat perbelanjaan dan lain-lain [2]. Dengan adanya sistem yang terkomputerisasi ini bertujuan untuk memudahkan kita dalam melakukan pekerjaan maupun segala hal yang berkaitan dengan computer [3] [4]. Tak heran jika pada zaman sekarang semua orang berusaha untuk membuat suatu sistem komputerisasi untuk mempermudah pekerjaan yang dilakukan oleh manusia [5].

Sistem perjalanan dinas sangat penting karena nantinya berkaitan dengan laporan keuangan sebuah instansi [6]. Oleh karena itu, data perjalanan dinas harus selalu tersimpan dengan baik di dalam basis data sebuah instansi pemerintahan[7] [8]. Dalam hal ini mengapa instansi sangat memperlukan sistem perhitungan perjalanan dinas yang digunakan untuk membuat pekerjaan menjadi lebih cepat serta fitur yang ada dalam suatu aplikasi itu sangat besar pengaruhnya untuk kelangsungan pekerjaan [9] [10].

# Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi dan Akuntasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNP Kediri



Dasar hukum mengenai perjalanan dinas diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007. Perjalanan dinas pindah dalam negeri diatur dalam keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.02/2003. Perjalanan dinas jabatan dan perjalanan dinas pindah luar negeri diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK/05/2010. Mengenai dengan standar biaya masukan (SBM) pada balai wilayah sungai kalimantan III diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 dan standar biaya umum (perwali) yang diatur dalam Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 02 Tahun 2013. sangat besar pengaruhnya untuk kelangsungan pekerjaan.

Penelitian terdahulu mengenai surat perintah perjalanan dinas hanya terfokus kepada pengelolaan surat perintah perjalanan dinas agar terorganisir dengan baik sedangkan pada penelitian sekarang tidak hanya fokus kepada pembuatan surat perintah tugas tetapi juga mencakup dengan perhitungan rincian biaya perjalanan dinas, kuitansi serta surat perintah bayar yang akan menghasilkan rekapitulasi pengeluaran selama melakukan perjalanan dinas tersebut [11] [12]. Pada Balai Wilayah Sungai Kalimantan III sendiri dalam kegiatan operasional penunjang pekerjaannya sangat sering berkaitan dengan perjalanan dinas guna melakukan kegiatan monitoring pekerjaan sampai dengan agenda yang sudah dibuatkan oleh kementrian PUPR, hal ini menjadikan alasan mengapa pentingnya program aplikasi ini dirancang sedemikian rupa untuk membuat aplikasi yang bisa berguna bagi Balai Wilayah Sungai Kalimantan III.

#### METODE

Metode penelitian pada kasus ini, merupakan metode studi kasus pembuatan sistem informasi perhitungan perjalanan dinas pada Balai Wilayah Sungai Kalimantan III. Adapun rincian dari sistem informasi perhitungan perjalanan dinas pada Balai Wilayah Sungai Kalimantan III sebagai berikut :

## Perhitungan biaya perjalanan dinas

Perhitungan Perjalanan Dinas dimulai dari pembuatan surat perintah tugas, rincian biaya perjalanan dinas, kuitansi dan Surat perintah bayar.

## Biaya Perjalanan Dinas

Biaya pada perjalanan dinas pada Balai Wilayah Sungai Kalimantan III sudah di atur oleh peraturan pemerintah mengenai biaya perjalanan dinas.

## **Bagian Administrasi**

Bagian administrasi memiliki tanggung jawab mengenai perhitungan perjalanan dinas setiap karyawan yang melaksanakan perjalanan dinas.

#### **Bagian Keuangan**

Bagian keunagan memiliki wewenang untuk mengeluarkan biaya yang sudah dibuatkan oleh bagian administrasi yang nantinya akan di lakukan pencairan dana guna untuk biaya perjalanan dinas yang akan dilakukan.

### Prosedur pembuatan surat perintah perjalanan dinas

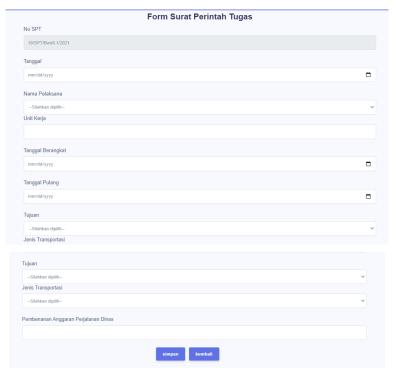
- a). Surat Perintah Tugas
  - Surat Perintah Tugas adalah surat yang berisikan informasi mengenai nama pegawai yang melakukan perjalanan dinas serta tujuan dan waktu pelaksanaan perjalanan dinas tersebut.
- b). Rincian Biaya Perjalanan Dinas
  - Rincian biaya perjalanan dinas berisikan informasi mengenai biaya-biaya apa saja yang dikeluarkan selama melakukan perjalanan dinas, seperti uang harian, uang transportasi, uang penginapan dll.
- c). Kuitansi
  - Kuitansi merupakan bagian lampiran untuk memberikan pengesahan mengenai biaya-biaya yang sudah dibayarkan kepada pegawai yang melakukan perjalanan dinas guna sebagai bukti pembayaran yang sah.
- d). Surat Perintah Bayar
  - Surat Perintah Bayar berguna melengkapi dari kuitansi untuk sebagai rujukan dari bagian administrasi ke bagian keuangan bahwa biaya-biaya untuk perjalanan dinas tersebut sudah bisa dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas.



## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## **Desain Form Surat Perintah Tugas**

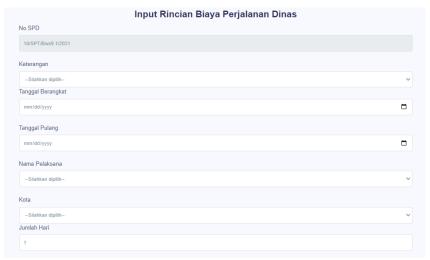
Form transaksi pada sistem informasi akuntansi (SIA) perhitungan biaya perjalanan dinas yang diusulkan pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui informasi mengenai data serta tempat dan tujuan perjalanan dinas tersebut. Form ini akan diinputkan oleh bagian administrasi. Gambar 1 dibawah ini adalah form surat perintah tugas.

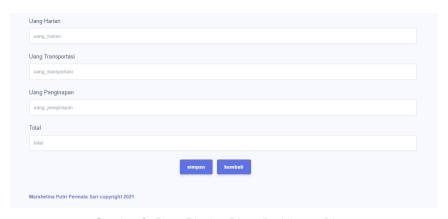


Gambar 1. Form Surat Perintah Tugas

## Form Rincian Biaya Perjalanan Dinas

Form Rincian Biaya Perjalanan Dinas ini berisikan informasi biaya-biaya yang dikeluarkan selama melaksanakan perjalanan dinas. Gambar 2 dibawah ini adalah form rincian biaya perjalanan dinas.





Gambar 2. Form Rincian Biaya Perjalanan Dinas

#### Form Kuitansi

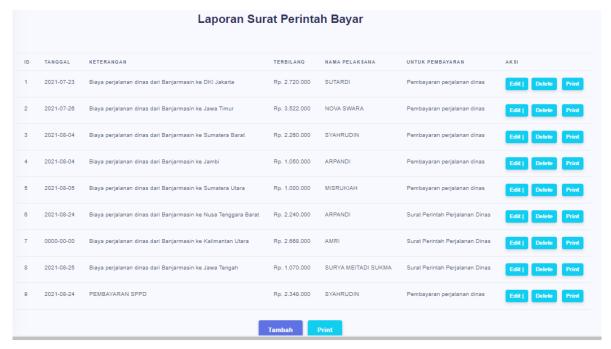
Form Kuitansi merupakan form bukti pembayaran yang sah yang nantinya disimpan sebagai bukti pembayaran. Gambar 3 dibawah ini adalah form kuitansi.



Gambar 3. Form Kuitansi

## Form Surat Perintah Bayar

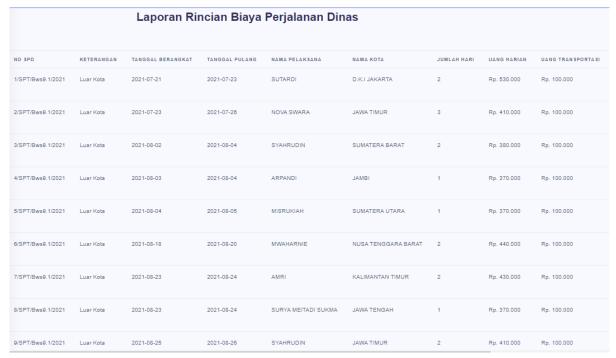
Form Surat Perintah Bayar berisikan informasi mengenai apakah surat perjalnan dinas tersebut sudah bisa dibayarkan dan diteruskan kepada bagian keuangan. Gambar 4 dibawah ini adalah form surat perintah bayar.



Gambar 4. Form Surat Perintah Bayar

## **Desain Output Surat Perintah Perjalanan Dinas**

Dokumen keluaran merupakan dokumen yang dihasilkan dari transaksi rincian biaya perjalanan dinas. Gambar 5 Form output rincian biaya perjalanan dinas.



Gambar 5. Form output rincian biaya perjalanan dinas

#### **KESIMPULAN**

Dengan adanya sistem informasi akuntansi perhitungan perjalanan dinas berbasis web yang diusulkan oleh peneliti ini dapat membantu Balai Wilayah Sungai Kalimatan III dalam proses perhitungan biaya perjalanan dinas yang dilakukan oleh bagian administrasi. Selain itu, sistem informasi akuntansi ini juga mempermudah dalam proses dalam pengelolaan kontrol keuangan dalam instansi.



### **DAFTAR RUJUKAN**

- [1] D. Saiful, "Aplikasi Sistem Informasi Daftar Nominatif Perjalanan Dinas Online Berbasis," *J. Widya Climago*, vol. 2, no. 1, pp. 20–28, 2020.
- [2] Zulhalim, "Aplikasi Surat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Menggunakan Visual Basic . Net , Postgresql Dan," (*Journal Inf. Syst. Informatics Comput.*, vol. 2, no. 1, 2018.
- [3] A. R. Hakim, T. Rija'i, and A. G. Wistira, "Sistem Informasi Perjalanan Dinas Pada Biro Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Berbasis WEB," in *Seminar Nasional Dinamika Informatika*, 2021, pp. 71–74.
- [4] M. Bahit, M. Handayani, and R. Haryanto, "Bibliometric Analysis on the Concept of Managing and Integrating ERP (Enterprise Resource Planning) in the MSMEs (Macro, Small and Medium Enterprises) Sector," *Adv. Econ. Bus. Manag. Res.*, vol. 183, no. Ambec 2020, pp. 5–9, 2021, doi: 10.2991/aebmr.k.210717.002.
- [5] S. Rachmawati, T. Retnasari, and S. Sunarto, "Optimalisasi Sistem Informasi Perjalanan Dinas Dalam Meningkatkan Efisiensi Biaya Perusahaan," *J. Teknol. dan Ilmu Komput. Prima*, vol. 1, no. 2, pp. 87–95, 2018, doi: 10.34012/jutikomp.v1i2.269.
- [6] H. Hirman and R. H. Pratama, "Analisis Sistem Informasi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Pada Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta," *Substansi Sumber Artik. Akunt. Audit. dan Keuang. Vokasi*, vol. 2, no. 1, p. 77, 2018, doi: 10.35837/subs.v2i1.274.
- [7] M. Handayani, M. Hendra, M. Bahit, and N. Safrina, "Traversal Tree Implementation in Chart of Account Design," in *Advances in Economics, Business and Management Research*, 2020, vol. 136, no. Ambec 2019, pp. 152–156, doi: 10.2991/aebmr.k.200415.030.
- [8] R. Handika and A. Widjaja, "Rancangan Sistem Informasi Surat Perintah Perjalanan Dinas Pada Balai Teknologi Air Dan Limbah Dengan Berbasis Aplikasi Web," *J. IDEALIS*, vol. 1, no. 1, pp. 416–422, 2018.
- [9] Dian Novianti and S. Amin, "Rancangbangun Sistem Informasi Surat Perintah Perjalanan Dinas Pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Papua Barat Berbasis Web," *J. Ilm. Indones.*, vol. 6, no. 6, p. 6, 2021.
- [10] W. Nurcahyo and Y. Agustina, "Manajemen Perjalanan Dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd)," *J. Ekon. dan Bisnis*, vol. 11, no. 1, pp. 61–70, 2012.
- [11] A. Geniusa and F. Samopa, "Pembuatan Sistem Informasi Perjalanan Dinas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (SIPD-Kanwil DJPBN)," *J. Tek. POMITS*, vol. 2, no. 2, pp. 366–370, 2013.
- [12] A. I. Harsapranata, "Perancangan Sistem Informasi Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas Menggunakan Metode Waterfall," in *SENDIU*, 2021, pp. 978–979.